

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Pertama). Bayumedia Publishing.
- Hamzah, A. (2008). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Revisi). PT. Radja Grafindo Persada.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Nawawi, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana* (9 ed.). Rajawali Pers.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing.
- Remmelink, J. (2003). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Jurnal Artikel:

- A, Ardanareswari. (2019). Combating Corruption in Indonesia: The Role of The

- Corruption Eradication Commission (KPK). *Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities*, 12(2), 65–78.
- Alhamidi, R. (2023). Vonis 2 PNS Diperberat Jadi 10 Tahun di Kasus Suap Hakim Agung. *Detik.com*. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-6878778/vonis-2-pns-diperberat-jadi-10-tahun-di-kasus-suap-hakim-agung>
- Anandya, D., & Easter, L. (2023). *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Hasil Korupsi Tahun 2022*.
- Andrianto, F. (2020). Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1), 114–123. <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Anjari, W. (2017). Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 122–129.
- Anjari, W. (2023a). Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i2.507>
- Anjari, W. (2023b). Penerapan Pemberatan Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 15(2), 263.
- Anjari W. (2017). Kejahatan Jabatan Dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila. *Jurnal Widya Yustisia*, 1(2), 122–129.
- Chazawi, A. (2005). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Pertama). Bayumedia Publishing.
- Ebiem Kahar, M. P., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, S. (2023). Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1), 46–58.
- Ebiem Kahar, M. P., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, S. (2023). Delik Suap dan Gratifikasi dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan Hakim dalam Praktik Penegakan Hukum. *Jurnal Anti Korupsi*, 13(1),

46–58. <https://doi.org/10.19184/jak>.

- H, Hidayat. (2020). Justice, Accountability and Corruption Eradication in Indonesia: A Legal Perspective. *Asian Journal of Criminology*, 15(4), 337–351.
- Hamzah, A. (2008a). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Revisi). PT. Radja Grafindo Persada.
- Hamzah, A. (2008b). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Radja Grafindo Persada.
- Ihsan, A., Azisa, N., & Haeranah. (2021). Pertimbangan Hakim Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(3), 138–148.
- Listiyono, S., & Meyrasyawati, D. (2015). Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Review Politik*, 5(2), 1.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Margono. (2019). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Moeljatno. (2001). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Muabezi, Z. A. (2017). Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 6(3), 421. <https://doi.org/10.25216/jhp.6.3.2017.421-446>
- N.A., Susanto. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus “ST” : Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213–235.

- Nawawi, B. (2003). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Nuryanto, C. (2018a). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1).
- Nuryanto, C. (2018b). Penegakan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusannya Antara Kepastian Hukum Dan Keadilan. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1).
- Odhy. (2021a). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(1), 192.
- Odhy, F. (2021b). Perspektif Budaya Hukum Dalam Perkembangan Kasus Korupsi di Indonesia. *Dharmasisya*, 1(1), 192.
- Prasetyo, T. (2018). *Hukum Pidana* (9 ed.). Rajawali Pers.
- R, Wahyuni., & Y, Herawati. (2018). The Role of Legal Protection for Government Officials in The Corruption Criminal Act. *Indonesian Journal International Law*, 15(4), 597–614.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologi*. Genta Publishing.
- Rahmat, D. (2020). FORMULASI KEBIJAKAN PIDANA DENDA DAN UANG PENGGANTI DALAM PENEGAKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(1), 11.
- Remmelink, J. (2003a). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Remmelink, J. (2003b). *Hukum Pidana Komentar atas Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rifai, A. (2011). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.

- Rosikah, C. D., & Listianingsih, D. M. (2016). *Pendidikan Anti Korupsi Kajian Anti Korupsi Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.
- Septianita, H. (2018). Keadilan Restoratif Dalam Putusan Pidana Anak. *Jurnal Yudisial*, 11(2), 193. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i2.290>
- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Srinita. (2016). Strategy Nullify Corruption in The Education Sector and Health. *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, 12(2), 1891–1902.
- Susanto. (2014). Dimensi aksiologis dari putusan kasus “ST”: Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 7(3), 213–235.
- Syarifuddin. (2020). *Prinsip Keadilan Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi: Implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2020 (Kesatu)*. Kencana.
- Unas, S. (2019a). *Lex Et Societatis*. VII(4), 58–65.
- Unas, S. (2019b). *Lex Et Societatis*. VII(4), 58–65.
- Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Perundang-Undangan Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 mengatur Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi